

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI KESEHATAN: TINJAUAN LITERATUR

Adzroo Atiiqoh Nur Nabiila¹, Nazhifa Nurul Azizah², Nasywa Athiyah Zahra³,
Acim Heri Iswanto⁴

^{1,2,3,4*} Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Jakarta, Indonesia, 16514

Corresponding author: 2310713053@mahasiswa.upnvj.ac.id/081218819951

Info Artikel

Sejarah artikel

Diterima : 16.04.2026

Disetujui : 24.04.2026

Dipublikasi : 30.05.2026

Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Laporan Keuangan, Organisasi Kesehatan, Transparansi

Abstrak

Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan elemen penting dalam penerapan *good governance* pada organisasi kesehatan karena berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, efektivitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan SDM, lemahnya pengendalian internal, rendahnya keterbukaan informasi publik, serta belum optimalnya digitalisasi sistem keuangan. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta menelaah hambatan dan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan sektor kesehatan. Penelitian menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan naratif melalui penelusuran artikel pada database Google Scholar dan GARUDA. Artikel yang dipilih dipublikasikan pada tahun 2018–2026, tersedia dalam teks lengkap, dan relevan dengan topik penelitian. Sebanyak 10 artikel dianalisis secara deskriptif berdasarkan tema utama penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, efektivitas pengelolaan dana, dan kinerja organisasi kesehatan. Kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, serta penerapan sistem informasi keuangan digital juga menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas organisasi. Di sisi lain, hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan kompetensi SDM, lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya keterbukaan informasi kepada publik, serta belum optimalnya integrasi sistem digital di beberapa organisasi kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem pengendalian internal, peningkatan digitalisasi sistem keuangan, dan keterbukaan laporan keuangan kepada masyarakat untuk mewujudkan tata kelola organisasi kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Transparency and Accountability of Financial Statements in Health Organizations: A Literature Review

Abstrak

Transparency and accountability in financial reporting are fundamental elements in implementing good governance within healthcare organizations, as they play a significant role in improving the quality of financial management, service effectiveness, and public trust. Nevertheless, the implementation in Indonesia still faces various challenges, such as limited human resources, weak internal control systems, low levels of public information disclosure, and suboptimal digitalization of financial systems. This literature review aims to analyze the implementation of transparency and accountability in financial

reporting within healthcare organizations, identify the factors influencing their implementation, and examine the obstacles and strategic efforts in strengthening financial governance in the healthcare. This study applied literature review method with a narrative approach through article searches in the Google Scholar and GARUDA databases. The selected articles were published between 2022 and 2026, accessible in full-text format, and relevant to the research topic. A total of 10 articles were analyzed descriptively based on the main research themes. The findings demonstrate that transparency and accountability positively influence the quality of financial reports, the effectiveness of fund management, and the performance of healthcare organizations. Human resource competence, internal control systems, and the implementation of digital financial information systems were also identified as important factors in supporting organizational accountability. However, the main obstacles found include limited human resource competence, weak internal supervision systems, lack of public access to information, and the suboptimal integration of digital systems in several healthcare organizations. Therefore, strengthening human resource capacity, optimizing internal control systems, enhancing the digitalization of financial systems, and improving public access to financial reports are necessary to achieve more transparent, accountable, and sustainable governance in healthcare organizations.

Keyword : *Accountability, Good Governance, Financial Reports, Health Organizations, Transparency*

Pendahuluan

Organisasi kesehatan memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel guna mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan merupakan bagian penting dari penerapan *good governance* karena berkaitan dengan keterbukaan informasi, pengawasan anggaran, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi kesehatan (Nelaz *et al.*, 2025). Mardiasmo (2018) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi aman (prinsipal), sedangkan transparansi mengacu pada keterbukaan informasi keuangan yang dapat diakses dan dievaluasi oleh pemangku kepentingan secara luas. Yulianti dan Terzaqi (2023) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan di fasilitas kesehatan, sehingga diperlukan penguatan tata kelola keuangan agar organisasi kesehatan dapat beroperasi secara lebih efektif dan terpercaya.

Penyimpangan keuangan dalam sektor kesehatan sangat rentan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 62 kasus korupsi di sektor kesehatan selama 2016-2023 dengan kerugian negara Rp821,21 miliar yang melibatkan 176 pelaku, mencakup penyimpangan pengadaan alat kesehatan, manipulasi klaim JKN, penggelembungan harga obat, hingga korupsi pembangunan fasilitas kesehatan (KPK, 2024). Djasri *et al.*, (2016) menjelaskan bahwa *fraud* dalam sistem jaminan kesehatan muncul akibat tekanan sistem pembiayaan, minimnya pengawasan, dan lemahnya transparansi dalam fasilitas kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 34/100 (*Transparency International*, 2023), mencerminkan bahwa lemahnya transparansi dan akuntabilitas khususnya di tengah kompleksitas pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, masih menjadi ancaman nyata bagi kualitas layanan kesehatan masyarakat (Susanti *et al.*, 2022; Juwita, 2023).

Secara operasional, terdapat disparitas yang nyata antara tuntutan regulasi pelaporan keuangan dan realitas implementasi tata kelola di fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan harus berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, kesetaraan, dan kewajaran, namun pada tataran

implementasi kesiapan kelembagaan masih tertinggal jauh dari amanat regulasi tersebut. Meskipun instansi seperti Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas berstatus BLUD diwajibkan untuk mandiri dan terbuka secara finansial, realita di lapangan membuktikan masih rendahnya kesiapan kelembagaan. Tenaga medis atau staf administrasi umum kerap kali mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola keuangan karena ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM), yang pada akhirnya menjadi kendala utama di bidang akuntansi (Fatonah & Supriono, 2024). Situasi ini memicu padatnya aktivitas pekerjaan, keterlambatan pelaporan, lemahnya kontrol internal, serta meningkatnya kerawanan kesalahan pencatatan dan kekeliruan data finansial (Maulia *et al.*, 2022). Di samping itu, penerapan sistem informasi keuangan dan digitalisasi pada institusi medis belum berjalan maksimal akibat minimnya fasilitas penunjang, rendahnya literasi digital pegawai, dan kurangnya keterpaduan antar sistem pelaporan (Hamid *et al.*, 2025). Penerapan sistem pengendalian internal (SPI) di fasilitas kesehatan BLUD juga masih belum optimal, khususnya pada aspek pemantauan, evaluasi, dan pengawasan fungsional yang semestinya menjadi sarana utama untuk mencegah penyelewengan dana publik (Siska *et al.*, 2021).

Penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas di sektor publik Indonesia telah berkembang, namun kajian yang secara spesifik menempatkan organisasi kesehatan seperti rumah sakit BLUD, puskesmas, maupun organisasi non-pemerintah bidang kesehatan sebagai unit analisis utama masih sangat terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada instansi pemerintah umum atau entitas nirlaba non-kesehatan (Puspitasari *et al.*, 2021). Selain itu, belum tersedia tinjauan literatur yang mensintesis aspek regulasi, implementasi, hambatan, dan rekomendasi kebijakan secara komprehensif dalam satu kerangka analisis, terlebih yang secara eksplisit menghubungkan kualitas pelaporan keuangan dengan mutu layanan kesehatan dan efektivitas strategi digitalisasi sebagai instrumen penguatan akuntabilitas (Djasari *et al.*, 2016; Putri *et al.*, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, *literature review* ini disusun guna meninjau dan menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi kesehatan. Kajian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya, serta menelaah berbagai hambatan dan upaya strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan di sektor kesehatan. Selain itu, review ini mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terkini sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh sebagai dasar pengembangan kebijakan dan praktik tata kelola keuangan kesehatan yang lebih efektif dan berkualitas.

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan naratif untuk mengenali dan mengelompokkan berbagai studi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dalam organisasi kesehatan. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis menggunakan *database* Google Scholar dan GARUDA dengan mengombinasikan kata kunci Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, meliputi “transparansi laporan keuangan”, “akuntabilitas keuangan”, “organisasi kesehatan”, “rumah sakit BLUD”, “puskesmas”, “*financial transparency*”, “*financial accountability*”, dan “*healthcare financial reporting*”. Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup artikel yang membahas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada organisasi kesehatan, dipublikasikan antara tahun 2018-2026, tersedia dalam teks lengkap dan akses terbuka, serta terindeks di salah satu *database* tersebut.

Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak dapat diakses secara lengkap, diterbitkan lebih dari lima tahun sebelum tahun pencarian, serta tidak relevan dengan topik yang dikaji. Seleksi artikel dilakukan melalui tahapan identifikasi berdasarkan kata kunci, penyaringan

judul dan abstrak, serta penelaahan kelayakan isi secara lengkap. Sebanyak 10 artikel memenuhi seluruh kriteria dan dijadikan sumber analisis utama. Ekstraksi data mencakup nama penulis, tahun publikasi, judul, desain studi, dan temuan utama. Analisis dilakukan secara deskriptif-naratif dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat tema, yaitu pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan, peran kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal, digitalisasi sistem keuangan, serta hambatan dan upaya strategis penguatan tata kelola keuangan organisasi kesehatan.

Validitas data dijaga melalui beberapa strategi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari beberapa artikel untuk mengonfirmasi konsistensi hasil sintesis. Kredibilitas sumber dipastikan dengan hanya menggunakan artikel yang telah melalui proses *peer-review*. Proses ekstraksi dan analisis data didokumentasi secara rinci menggunakan tabel karakteristik artikel. Selain itu, interpretasi temuan dikembalikan pada isi artikel secara langsung untuk meminimalkan subjektivitas peneliti, dan seluruh proses analisis didiskusikan bersama seluruh anggota tim peneliti guna memperoleh kesepakatan interpretasi yang konsisten.

Hasil Penelitian

Melalui tahapan identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan, diperoleh 10 artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Artikel terpilih mencakup berbagai desain penelitian, meliputi studi kualitatif, kuantitatif, studi kasus, dan analisis deskriptif, dengan rentang publikasi antara tahun 2018 hingga 2026. Sebaran artikel terdiri atas tujuh studi kuantitatif, dua studi kualitatif deskriptif, dan satu studi kasus kualitatif. Seluruh artikel berfokus pada organisasi kesehatan di Indonesia, mencakup puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD), dan dinas kesehatan. Karakteristik lengkap setiap artikel disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan hasil analisis, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta efektivitas pengelolaan keuangan di organisasi kesehatan. Berbagai upaya yang banyak diterapkan antara lain pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis digital, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya fungsi pengawasan internal, rendahnya tingkat keterbukaan informasi kepada publik, serta belum optimalnya integrasi sistem digital dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Tabel 1. Karakteristik Artikel Penelitian tentang Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Organisasi Kesehatan

No	Penulis (tahun)	Judul Artikel	Desain Studi	Temuan
1	Hidayat <i>et al.</i> , (2022)	Transparansi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat Di Masa Pandemi Covid-19	Kualitatif Studi Kasus	Rumah sakit telah menggunakan sistem SIMDA dalam pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan secara berkala kepada pemerintah daerah. Namun transparansi belum optimal karena laporan keuangan dan laporan kinerja belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat serta <i>website</i> rumah sakit tidak diperbarui secara aktif
2	Noriwari <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Seksi Kesmavet Papua Tengah	Kuantitatif	Penelitian menemukan bahwa penerapan prinsip <i>good governance</i> melalui akuntabilitas dan transparansi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor kesehatan. Laporan yang transparan mempermudah

				proses evaluasi dan pengawasan keuangan organisasi.
3	Latif <i>et al.</i> , (2023)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan di Puskesmas Mijen 1 Demak	Kuantitatif	Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan puskesmas. Semakin tinggi penerapan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan, maka semakin baik kualitas laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan.
4	Cahyaningsih <i>et al.</i> , (2024)	Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I)	Kuantitatif	Akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di UPT Puskesmas Banyudono I. Transparansi dilakukan melalui penyampaian informasi keuangan yang terbuka, jelas, dan mudah diakses, sedangkan akuntabilitas mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Ketiga variabel penelitian berpengaruh sebesar 67,1% terhadap kinerja pegawai.
5	Hadijah <i>et al.</i> , (2025)	Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada RSUD Kabupaten Muna Barat)	Kualitatif Studi Kasus	Penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di RSUD diterapkan melalui perencanaan anggaran, pengawasan keuangan, audit eksternal, serta penyusunan LPJ tahunan. Praktik tersebut meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat, meskipun keterbukaan akses laporan keuangan kepada publik masih terbatas karena belum tersedia media publikasi online.
6	Oka & Nugraeni (2026)	Pengaruh Implementasi Akuntansi Sektor Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan RSUD Kabupaten Nunukan	Kuantitatif	Penerapan akuntansi sektor publik memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di RSUD Kabupaten Nunukan dengan kontribusi sebesar 27,2%. Namun, penerapan tersebut belum berpengaruh signifikan terhadap transparansi keuangan karena transparansi turut dipengaruhi oleh budaya organisasi dan keterbukaan informasi.
7	Bahri <i>et al.</i> , (2024)	<i>Implementation of The Accounting Information Systems in The Financial Management of Community Health Center</i>	Kuantitatif	Transparansi dan akuntabilitas terbukti berpengaruh signifikan dalam mendukung pengelolaan keuangan Puskesmas BLUD, sementara sistem informasi akuntansi menunjukkan pengaruh positif tetapi belum signifikan terhadap pengelolaan keuangan organisasi kesehatan.
8	Ariyanti <i>et al.</i> , (2025)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kabupaten Blora	Kuantitatif	Peneliti menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi keuangan, dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Rendahnya kemampuan teknis pegawai menyebabkan keterlambatan pelaporan dan meningkatkan risiko kesalahan administrasi.
9	Wewenggang & Poputra (2025)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Studi Kasus pada Puskesmas Sonder Kabupaten Minahasa	Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOK telah dilakukan sesuai prosedur administrasi dan regulasi pemerintah. Namun, keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana masih belum maksimal sehingga transparansi publik belum sepenuhnya tercapai.
10	Rahmayani & Revida (2025)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan	Kuantitatif	Terdapat korelasi positif yang signifikan antara transparansi anggaran publik dengan efisiensi kinerja layanan. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada keandalan infrastruktur sistem informasi kesehatan yang digunakan.

Pembahasan

1. Pengaruh pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja organisasi kesehatan

Transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta kinerja organisasi kesehatan. Berbagai literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa penerapan kedua prinsip ini di fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit daerah berkorelasi langsung dengan meningkatnya mutu pengelolaan dana publik. Penelitian Latif *et al.* (2023) menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan keuangan di Puskesmas Mijen 1 Demak, di mana peningkatan keterbukaan informasi serta pertanggungjawaban keuangan turut mendorong kualitas laporan keuangan dan efektivitas pengelolaan dana kesehatan menjadi lebih baik. Noriwari *et al.* (2025) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* melalui transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor kesehatan karena mempermudah proses pengawasan dan evaluasi keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Cahyaningsih *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai UPT Puskesmas Banyudono I. Secara umum, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga mendukung kualitas tata kelola, efektivitas pelayanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi kesehatan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam mendukung *good governance* pada organisasi kesehatan. Secara teoritis, transparansi memungkinkan informasi keuangan dapat diakses secara terbuka dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban organisasi dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Kedua prinsip tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan *good governance* serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi

kesehatan (Putri *et al.*, 2025). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hadijah *et al.* (2025) dan Hidayat *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa rumah sakit telah menerapkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan, pengawasan, dan audit, namun pelaksanaan transparansi kepada publik masih belum optimal akibat keterbatasan akses informasi dan media publikasi daring.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal sebagai Faktor Penentu Akuntabilitas

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sistem pengendalian internal (SPI) merupakan dua faktor yang terbukti menentukan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas fasilitas kesehatan. Ariyanti *et al.* (2025) menemukan bahwa rendahnya kemampuan teknis pegawai di Puskesmas Kabupaten Blera menyebabkan keterlambatan pelaporan dan meningkatnya risiko kesalahan administrasi, sementara Fatonah & Supriono (2024) mencatat bahwa ketiadaan tenaga akuntansi khusus mendorong pelimpahan fungsi keuangan kepada staf medis sehingga beban kerja menumpuk dan kontrol internal lemah. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya SPI, terutama pada aspek pemantauan dan evaluasi (Siska *et al.*, 2024). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Nadhifah *et al.* (2024) yang mengonfirmasi bahwa pengendalian internal, kompetensi SDM, dan audit internal merupakan ketiga variabel yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Studi yang dilakukan oleh Pratama *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kompetensi SDM, dan SPI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sektor publik. Artinya, upaya meningkatkan kualitas pelaporan tidak dapat bertumpu hanya pada perbaikan sistem, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas SDM yang memahami prinsip akuntansi berbasis akrual sesuai PSAP Nomor 13. Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan SPI yang terintegrasi dengan fungsi audit internal berbasis risiko, serta pemenuhan tenaga akuntansi khusus di fasilitas kesehatan menjadi agenda prioritas yang tidak dapat ditunda untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan yang sesungguhnya.

3. Digitalisasi Sistem Informasi Keuangan sebagai Instrumen Penguatan Transparansi

Transformasi digital pada sistem pelaporan finansial merupakan langkah vital yang sangat krusial dalam meningkatkan keterbukaan dan

kredibilitas di institusi layanan medis. Hamid *et al.* (2025) mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sanggup mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sektor publik melalui mekanisme pembukuan yang lebih cepat, terpadu, dan mudah dipantau. Bukti ini sejalan dengan penelitian Bahri *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berdampak positif pada penataan dana di puskesmas BLUD, utamanya dalam mendorong keakuratan pencatatan dan keteraturan pelaporan. Transformasi digital memungkinkan secara *real time* sehingga melancarkan proses audit dan menekan risiko manipulasi data keuangan. Abdullah *et al.* (2023) melalui bimbingan sistem akuntansi e-BLUD di sejumlah puskesmas Karanganyar menemukan bahwa teknologi digital mampu mempercepat penyusunan laporan pertanggungjawaban serta meminimalkan kesalahan administratif. Kusuma dan Andayani (2023) turut menegaskan bahwa penggunaan SIA membuat pelaporan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan berkesinambungan. Kesimpulannya, digitalisasi tidak sekadar meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperkuat akuntabilitas melalui sajian data yang lebih akurat, tercatat rapi, dan mudah diakses publik.

Walaupun demikian, efektivitas digitalisasi sistem keuangan belum berjalan maksimal akibat kendala struktural dan organisasional. Hamid *et al.* (2025) menemukan bahwa minimnya literasi digital pegawai, keterbatasan infrastruktur, serta sistem pelaporan yang belum terintegrasi menjadi tantangan utama di fasilitas kesehatan. Senada dengan itu, Hidayat *et al.* (2022) mengamati bahwa transparansi publik di RSUD Kalisat masih rendah karena minimnya keterbukaan informasi dan pembaruan situs web. Lebih lanjut, Oka & Nugraeni (2026) mencatat bahwa akuntansi sektor publik di RSUD Kabupaten Nunukan belum berdampak signifikan pada transparansi, yang justru lebih dipengaruhi oleh budaya organisasi serta komitmen keterbukaan. Di sisi lain, Rahmayani & Revida (2025) menegaskan bahwa infrastruktur sistem informasi yang andal adalah kunci keberhasilan transparansi anggaran. Oleh sebab itu, transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan kompetensi SDM, integrasi antar sistem, dan komitmen institusi agar benar-benar mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi kesehatan.

4. Hambatan implementasi dan upaya strategi Penguatan Tata Kelola Keuangan Organisasi Kesehatan

Implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan di organisasi kesehatan

Indonesia menghadapi tiga kategori hambatan utama yang saling berkaitan. Pertama, kesenjangan antara regulasi dan kapasitas implementasi: fasilitas BLUD yang diwajibkan mandiri finansial belum ditopang oleh kesiapan SDM dan sistem yang memadai, sehingga PSAP masih mengalami kendala (Maulia *et al.*, 2022). Kedua, terbatasnya keterbukaan informasi kepada publik: meskipun laporan keuangan disusun secara internal, diseminasi kepada masyarakat masih minim (Wewengkang & Poputra, 2025). Ketiga, kerentanan terhadap fraud: Tito & Siregar (2024), mengidentifikasi bahwa lemahnya supervisi internal, keterbatasan SDM, dan minim pelatihan menjadi faktor pemicu utama kecurangan dalam program JKN, sementara pengendalian internal yang kuat, penerapan SOP, dan budaya kerja berintegritas terbukti sebagai penghambat efektifnya.

Menghadapi hambatan tersebut, diperlukan empat upaya strategis yang berbasis bukti. Pertama, penguatan kapasitas SDM berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan teknis terbukti meningkatkan kualitas laporan (Ariyanti *et al.*, 2025). Kedua, optimalisasi SPI yang terintegrasi mampu memperkuat pengawasan dan mencegah penyimpangan secara sistemik (Siska *et al.*, 2021; Nelaz *et al.*, 2025). Ketiga, akselerasi digitalisasi sistem informasi keuangan disertai pelatihan SDM dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan (Hamid *et al.*, 2025; Rahmayani & Revida, 2025). Keempat, Pratama *et al.*, (2024) menegaskan perlunya pemenuhan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara menyeluruh, yang harus dibarengi publikasi laporan keuangan terbuka dan dapat diakses publik sebagai wujud nyata komitmen *good governance* di sektor kesehatan (Putri *et al.*, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi kesehatan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, serta digitalisasi sistem informasi keuangan terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas pengelolaan dana, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, implementasinya masih dihadapkan berbagai hambatan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya keterbukaan informasi kepada publik, serta belum optimalnya integrasi sistem digital di beberapa organisasi kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi tata kelola keuangan di sektor kesehatan masih terdapat kesenjangan antara

tuntutan regulasi dengan pelaksanaannya di lapangan.

Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, mengoptimalkan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan organisasi kesehatan. Selain itu, keterbukaan akses laporan keuangan kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan sebagai bentuk penerapan *good governance* dan upaya membangun kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan pada berbagai jenis organisasi kesehatan secara lebih mendalam pada berbagai jenis organisasi kesehatan di Indonesia sehingga dapat menghasilkan rekomendasi strategi tata kelola keuangan yang

lebih optimal dan berkelanjutan. Bagian kesimpulan ditulis dalam bentuk naratif.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan konstruktif yang diberikan selama proses penyusunan *literature review* ini. Apresiasi mendalam juga ditujukan kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan lingkungan akademik yang kondusif bagi tim penulis untuk menyelesaikan kajian ini. Seluruh kontribusi, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menelaah urgensi tata kelola organisasi keuangan yang transparan pada sektor kesehatan.

Referensi

- Abdullah, S., Supartini, S., Maryanti, I. E., & Widyaswati, R. (2023). PENDAMPINGAN SISTEM AKUNTANSI E-BLUD DI PUSKESMAS JENAWI, JATIIYOSO DAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR. *GANESHA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 102–110. <https://doi.org/10.36728/GANESHA.V3I2.2521>
- Ariyanti, I., Mazidah, N., Sari, I. P., Stie, C., Bojonegoro, J., & Timur, I. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas Kabupaten Blora. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1203–1209. <https://doi.org/10.57141/KOMPETEN.V4I1.208>
- Bahri, F., Susanti, L., Azlina, N., Nasir, A., & Pinto Atami, A. (2024). *IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF COMMUNITY HEALTH CENTER* (Vol. 1, Number 2).
- Cahyaningsih, N., Rukmini, & Ma'ruf, M. H. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus UPT Puskesmas Banyudono I). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 449–455. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.99>
- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). Korupsi dalam pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian besarnya potensi dan sistem pengendalian fraud. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2(1), 113–133. <https://doi.org/10.32697/integritas.v2i1.127>
- Fatonah, F., & Supriono, S. (2024). Pengujian Substantif Pengeluaran Kas Pada Puskesmas Kemiri Kabupaten Purworejo. *Jurnal Akuntansi Pajak Dan Manajemen*, 7(2), 83–92. <https://doi.org/10.37601/tajam.v7i2.295>
- Hadijah, S., Ode Ade Nurfaida, W., Juliana, N., Rohmawati, W., Vokasi, F., & Karya Persada Muna, U. (2025). *Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN (STUDI KASUS PADA RSUD KABUPATEN MUNA BARAT)*. 3(3). <https://doi.org/10.65096/pmb.v3i3.1796>
- Hamid, A., Hermawati, Aulia, P., & Adelia, T. D. (2025). PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN SEKTOR PUBLIC. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 4627–4633.
- Hidayat, M. S., Wardhaningrum, O. A., & Andriana. (2022). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah Kalisat di masa pandemi Covid-19. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 56–61.
- Juwita, R. (2023). Understanding the typology of health sector corruption in Indonesia. *Indonesia Law Review*, 13(2), 89–122.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Menengok akar infeksi korupsi sektor kesehatan. Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240605-menengok-akar-infeksi-korupsi-sektor-kesehatan>
- Kusuma, R. H., & Andayani, S. (2023). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi Pada Puskesmas BLUD. *SenSaSi*, 2(01), 58–64. <https://doi.org/10.33005/sensasi.v2i1.42>

- Latif, A., Rohmatika, F., Pratiwi, R., & Purnomo, M. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas pengelolaan keuangan (Studi empiris di Puskesmas Mijen 1 Demak). *STIESEM 2023 (International Webinar & Call for Paper): Utilization of Technology in Economic Development and MSMEs*, 3(1). <https://eprosiding.stiesemarang.ac.id/index.php/SNMAS/article/view/64>
- Maulia, H., Renaldi, R., Wardani, S., Widodo, M. D., & Sando, W. (2022). Analisis Hambatan Dalam Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Puskesmas Di Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Olahraga Dan Kesehatan (ORKES)*, 1(2), 76–87. <https://doi.org/10.56466/orkes/vol1.iss2.8>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nadhifah, M. S., Mahmudah, A., Dilasari, A. P., Salukh, A., & Ani, H. N. (2024). Pengendalian Internal, Kompetensi SDM, dan Kualitas Laporan Keuangan: Peran Moderasi Audit Internal. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 41(1), 60–72. <https://doi.org/10.58906/melati.v41i1.217>
- Nelaz, Y. S., Nurhasanah, D., Afriyani, N., & Nindyawan, B. P. (2025). *Peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan rumah sakit*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(2). <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jak/article/view/4771>
- Noriwari, M. A., Pasae, Y., & Sirante, Y. (2025). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan di Seksi Kesmavet Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Papua Tengah. *ECOHOLIC: Jurnal Ekonomi Holistik*, 1(2), 414–420.
- Oka, E., & Nugraeni, N. (2026). PENGARUH IMPLEMENTASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN RSUD KABUPATEN NUNUKAN. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 10(1). <https://doi.org/10.29040/jie.v10i1.18948>
- Pratama, E. A., Sinadela, S., & Gushendarto, G. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi). *Journal of Economics and Management*, 2(1), 47–59. <https://doi.org/10.55681/ecoma.v2i1.38>
- Putri, A. A., Lumbantobing, S. B., & Wasir, R. (2025). Membangun transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sistem kesehatan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kedokteran dan Kesehatan*, 4(2), 294–303. <https://doi.org/10.55606/klinik.v4i2.3986>
- Puspitasari, V. I., Lutfillah, N. Q., & Isrowiyah, A. (2021). Mengungkap proses penyusunan laporan keuangan pada rumah sakit pemerintah. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, 5(1), 27–36. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i1.003>
- Rahmayani, M., & Revida, E. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelayanan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan. *SAJJANA: Public Administration Review*, 3(01), 57–66. <https://doi.org/10.32734/SAJJANA.V3I01.21071>
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.
- Siska, M., Sari, R. N., & Basri, Y. M. (2021). Determinan Kinerja Sektor Publik: Dimoderasi Sistem Pengendalian Interen pada Puskesmas BLUD di Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 81–95. <https://doi.org/10.30659/JAI.10.1.81-95>
- Susanti, D., Arifin, P., Rahma, P. A., Fahmi, M., Julacha, L., & Putri, W. A. (2022). Tackling fraud and corruption in Indonesia's health insurance system. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2022:13). <https://www.u4.no/publications/tackling-fraud-and-corruption-in-indonesias-health-insurance-system>
- Tito, J. S., & Siregar, K. N. (2024). Faktor pemicu dan penghambat fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional serta strategi pencegahannya: Sebuah scoping review. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v9i2.1124>
- Transparency International. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Berlin: Transparency International. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Wewengkang, F. E., & Poputra, A. T. P. (2025). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) studi kasus pada puskesmas Sonder Kabupaten Minahasa. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3(2), 447–453. <https://doi.org/10.58784/rapi.367>
- Yulianti, Y., & Terzaqi, M. T. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Puskesmas Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3466. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4418>